

Oleh : [Bayu Utomo](#)

Masalah perubahan iklim adalah masalah kompleks bukan masalah lingkungan saja tetapi menyangkut masalah ekonomi, perdagangan, dan keamanan. Masalah kompleks ini menjadi tanggung jawab semua warga planet ini terutama masalah keamanan yang sangat rawan berkembang ke masalah konflik. Laporan yang dikeluarkan oleh *Intergovernmental Panel (PBB) on Climate Change* (IPCC)

Februari 2007 menegaskan bahwa dunia menghadapi kenaikan suhu rata-rata 3 0C pada abad ini. Jika emisi gas-gas rumah kaca meningkat berdasarkan kecepatan rata-rata saat ini dan dibiarkan meningkat dua kali lipat dari tingkat sebelum era industri, IPCC mengindikasikan potensi bahaya perubahan iklim akan memicu konflik antar negara karena masalah air, penyebaran penyakit, dan meningkatnya migrasi di seluruh dunia yang akan menimbulkan masalah sosial, ekonomi, dan keamanan.

Salah satu anggota IPCC Edmundo de Alba mengatakan bahwa Terusan Panama akan tenggelam sebagai akibat dari mencairnya es di Kutub Utara (Kompas, 12 April 2007). Naiknya suhu udara juga akan menyebabkan ketimpangan kondisi alam, disebutkan bahwa dengan meningkatnya suhu udara akan memicu kondisi ekstrem yaitu akan ada wilayah yang kering menjadi bertambah kering dan sebaliknya wilayah basah akan bertambah basah. Hal ini akan mengakibatkan dampak sosial yang berpotensi menimbulkan ketegangan dengan adanya perebutan pembagian air untuk kepentingan industri, pertanian, maupun penduduk.

Masalah keamanan menjadi masalah yang amat penting untuk diangkat. Seperti yang diungkapkan Beckett di depan 15 anggota DK PBB 17 April 2007 kemarin *Impikasi perubahan iklim bagi keamanan kita jauh lebih mendasar dan lebih menyeluruh dibanding suatu konflik*. Suatu contoh misalnya kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia yang asapnya sampai Malaysia dan Singapura sempat membuat hubungan kedua negara tegang. Demikian juga yang diungkapkan 11 purnawirawan jenderal dan admiral AS bahwa dalam 30 sampai 40 tahun ke depan akan terjadi sejumlah perang yang diakibatkan masalah air (Kompas, 23 April 2007). Masalah keamanan sangat erat kaitannya dengan masalah tapal batas suatu Negara yang menjadi kedaulatan suatu bangsa. Peningkatan permukaan air laut sebagai akibat adanya pemanasan global akan berdampak pada kedaulatan suatu negara. Dengan meningkatnya permukaan air laut akan mengakibatkan beberapa pulau-pulau terluar tenggelam sehingga akan menghilangkan batas wilayah suatu negara. Jika batas darat hilang karena kerusakan lingkungan dan pemanasan global, maka dapat dipastikan ruang udara juga tidak dapat diakui sebagai wilayah kedaulatannya. Akibatnya ketegangan terjadi dalam memperebutkan batas wilayah dan nantinya kekuatan militerlah yang berbicara. Sedikit menengok ke belakang bahwa beberapa tahun yang lalu ketegangan terjadi antara Malaysia dan Indonesia dalam

memperebutkan batas wilayah.

Benua Asia memiliki kondisi khas terkait perubahan iklim. China sedang menikmati pertumbuhan ekonomi yang pesat yang diikuti oleh konsumsi energi yang sangat besar, Sedangkan India memantapkan posisinya sebagai pemain besar produsen teknologi informasi ditingkat global. Sehingga memantapkan posisi kedua Negara berada pada urutan kedua untuk China dan kelima untuk India dalam jumlah emisi total dunia (Kompas, 23 April 2007). Di lain pihak hutan sebagai penyerap polutan (CO₂) yang berperan penting dalam akumulasi gas rumah kaca semakin habis untuk kegiatan ekonomi. Kondisi khas ini membawa Asia menjadi wilayah yang paling parah sebagai akibat pemanasan global. Diprediksikan bahwa setiap kenaikan suhu udara 2 oC akan menurunkan produksi pertanian antara lain di Cina dan Bangladesh sebanyak 30% pada tahun 2050 (www.kompas.com/12 April 2007). Kelangkaan air meningkat seiring dengan menurunnya lapisan es pegunungan Himalaya. Salah satu dampak yang paling banyak terjadi sebagai akibat pemanasan global adalah peningkatan permukaan air laut. Peningkatan permukaan air laut setinggi 1 hingga 3 milimeter setiap tahunnya akan menyebabkan 100 juta penduduk di pesisir pantai akan tenggelam.

Untuk menjamin perdamaian dunia masalah pemanasan global harus dihentikan dan emisi gas rumah kaca harus dikurangi. Pemanasan global adalah masalah global jadi penyelesaiannya harus secara internasional. Beberapa langkah sudah dan telah diambil diantaranya adanya Kerangka Konvensi untuk Perubahan Iklim (*Framework Convention for Climate Change*) tahun 1992 yang ditandatangani oleh 167 negara di Rio de Janeiro, Brazil. Kerangka ini mengikat secara moral negara-negara industri untuk menstabilkan emisi karbondioksida mereka. Namun upaya ini gagal karena sedikit negara industri yang memenuhi target. Langkah selanjutnya dibuatlah Protokol Kyoto yang mengikat secara hukum yang bertujuan mengharuskan negara-negara industri menurunkan emisinya secara kolektif sebesar 5,2% dari tingkat emisinya tahun 1990. Untuk dapat diterapkan secara hukum internasional (*enter into force*), protokol Kyoto ini harus memenuhi 55% dari jumlah negara penandatangan kesepakatan. Sampai Oktober 2004 sejumlah 126 negara telah meratifikasi. Jumlah ini telah melebihi 55% dari penandatangan kesepakatan. Namun emisi dari negara-negara yang telah menandatangani kesepakatan, baru mencapai 44,2% dibawah angka yang disyaratkan yaitu 55%.

Ironisnya Negara adidaya Amerika Serikat dan sekutunya Australia menolak meratifikasi. Menurut skema Protokol Kyoto AS seharusnya menurunkan 7% emisi gas rumah kacanya dari tingkat tahun 1990 dan Australia berkewajiban menurunkan 8% emisi gas rumah kacanya. Kedua Negara besar tersebut menolak mendatangi dan meratifikasi Protokol Kyoto. Padahal kedua Negara tersebut mempunyai tingkat emisi yang besar. Amerika Serikat saat ini memproduksi emisi 5,91 miliar metrik ton tahun 2004 dan merupakan Negara pengemisi

terbesar di dunia. Australia sebanyak 0,39 miliar metrik ton (Kompas 23 April 2007). Oleh karena itu dibutuhkan suatu instrument baru menggantikan Protokol Kyoto yang akan habis masanya pada 2012 yang tentu saja dapat mengikat secara internasional.